

Burma/Myanmar: Negara Yang Terus Bergolak Sejak Memperoleh Kemerdekaan dari Pemerintahan Kolonial Inggris pada Tahun 1948

**Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Universitas Kristen Satya Wacana, 1982**

Prolog: Sejarah Singkat Burma/Myanmar

Burma/Myanmar terletak di bagian barat daratan Asia Tenggara, berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut, Laos di sebelah timur, Thailand di sebelah tenggara, Laut Andaman dan Teluk Benggala di sebelah selatan dan barat daya, Bangladesh di sebelah barat, serta India di sebelah barat laut. Pada tahun 1989, nama resmi negara tersebut dalam bahasa Inggris, yang telah digunakan sejak 1885, diubah dari semula bernama Union of Burma menjadi Union of Myanmar; dalam bahasa Burma, negara tersebut telah dikenal sebagai Myanma (atau, lebih tepatnya, Mranma Prañ) sejak abad ke-13. Ibu kotanya, Nay Pyi Taw, terletak di bagian tengah negara, sedangkan kota terbesar, Yangon (sebelumnya Rangoon), berada di bagian selatan.

Menurut fragmen rahang primata yang ditemukan di Myaing Township, Magway Division, sejarah Myanmar dapat diasumsikan telah dimulai 40 juta tahun yang lalu. Penemuan yang dinamakan Pondaungia ditemukan di daerah Pondaung dan penemuan yang dinamakan Mogaungensis ditemukan di dekat Desa Mogaung menunjukkan bahwa anthropoid telah hidup di Myanmar sejak 40 juta tahun yang lalu. Primata tingkat tinggi yang ditemukan di daerah Pondaung, Myanmar, yang disebut Dawn Ape dengan nama ilmiah Amphipithecus, telah diuji berusia 40 juta tahun. Myanmar juga mengalami Zaman Batu. Manusia Paleolitikum telah hidup di sepanjang Sungai Irrawaddy di Myanmar Tengah sejak Pleistosen Tengah. Pada 9000 SM, jejak peradaban Paleolitikum Akhir dan Neolitikum Awal ditemukan di Gua Padalin. Manusia Neolitikum hidup di Gua Padalin dari 5740 SM hingga 4570 SM. Peralatan dan senjata Neolitikum telah banyak ditemukan di Tanintharyi di selatan, di Putao di utara, dari kaki Rakhine Yoma di barat hingga Sungai Thanlwin di timur. Penggalian arkeologi oleh Department of Archeology and National Museum menemukan bukti masyarakat Zaman Perunggu Akhir sekitar 900 SM di daerah Nyaungkan, Butalin Township; masyarakat Zaman Besi awal sekitar 710 SM di situs Taung Thaman; dan antara 530 SM dan 90 SM, masyarakat Zaman Besi antara 530 SM dan 90 SM di Desa Ywar Htin Gone, Pyaw Bwe Township, Yamethin District, Mandalay Region. Oleh karena itu, telah ditetapkan fakta bahwa kebudayaan Zaman Batu, Zaman Perunggu, dan Zaman Besi berkembang secara berturut-turut di Myanmar. Memasuki sejarah yang tercatat, periode Pyu berlangsung antara 100 SM dan abad ke-9 M, dengan berdirinya negara-negara kota. Pusat-pusat peradaban Pyu adalah kota-kota tua Han Lin, Sri Ksetra dan Beikthano.

Orang Pyu mampu mencatat dan menuliskan literatur mereka sendiri pada benda-benda seperti lempengan batu, tablet nazar, manuskrip daun lontar emas, dan tempayan pemakaman. Orang Pyu mampu mendirikan negara-negara kota dan hidup makmur dengan pemerintahan dan kebudayaan mereka sendiri. Menurut Kronik Myanmar, Thamuddarit memerintah 19 desa Bagan dan menobatkan dirinya sebagai raja di tempat yang disebut Yonelhwat, sekitar 7 mil dari Sungai Irrawaddy pada tahun 107 M.

Pada tahun 167 M, selama pemerintahan Raja Pyusawhti, tempat tersebut disebut Arimaddhana. Pada tahun 344 M, selama pemerintahan Raja Theylekyauung, 19 desa tersebut dihancurkan dan sebuah kota dibangun di tempat Lawkananda dan dinamai Thiripyitsaya. Pada tahun 516 M, selama pemerintahan Raja Thaik Tai, ibu kota dipindahkan dari Thiripyitsaya ke Desa Ywar Seik, dan dinamai Tampavati. Negara-negara kota yang muncul dalam sejarah awal Myanmar sekitar abad ke-9 berada dalam keadaan kacau. Namun demikian, orang-orang zaman dahulu berusaha menciptakan Negara Baru, dan pada tahun 849 M, Raja Pyinpya berhasil mendirikan kota Bagan. Raja Anawrahta (1044-1077 M), merupakan raja ke-42 dari 55 raja Dinasti Bagan, mendirikan Kekaisaran Myanmar pertama dengan menggunakan berbagai cara militer, ekonomi, dan sosial serta menempatkan Myanmar di peta dunia. Selama pemerintahan Raja Nayathihapatae (1256–1287 M), situasi politik menjadi tidak stabil karena krisis ekonomi. Pemberontakan muncul di karena kewibawaan raja yang semakin memburuk. Pada tahun 1277, invasi Mongol semakin mengacaukan negara dan ketika Dala Sarr Kyaw Swar (1287-1298) naik takhta Bagan, otoritas pusat ditantang oleh tiga pangeran Shan-Myanmar; Athinkhayar, Yarzathingyan, dan Thiha Thu, yang telah mengumpulkan kekayaan dan pengaruh besar di 11 desa Ledwin, Distrik Kyaukse. Pada saat Saw Mon Hnit, putra Saw Hnit, naik takhta Bagan pada tahun 1325, kekuasaan Kerajaan Bagan hanya tinggal seutas benang, dan akhirnya runtuh pada tahun 1368. Pada tahun 1312, yang termuda dari tiga pangeran Shan-Myanmar, Thiha Thu mendirikan Pinya dan menamakannya Wizaya Pura, menjadikannya ibu kota kerajaan. Thiha Thu memiliki putra-putra berbakat seperti Uzanar, KyawSwar, Nawrahta, Athinkhayar Sawyun dan Taraphyargyi. Salah satu putranya, Athinkhayar Sawyun, mengonsolidasikan Wilayah Utara yang berpusat di Sagaing menjadi Kerajaan Feodal baru pada tahun 1315. Namun, pada tahun 1364, pasukan yang dipimpin oleh penguasa feodal Shan Tho Chi Bwa menyerang Tagaung, Pinya, dan Sagaing dengan sengit, dan pada tahun tersebut, kerajaan-kerajaan kecil Sagaing dan Pinya dihancurkan. Orang yang mengorganisasi kembali negara setelah runtuhnya Pinya dan Sagaing adalah Thatoe Min Phyar, keturunan Athinkhayar Sawyun. Pada tahun 1364, Kyi loch, Kyaukmaw loch, Intoo loch dan Ohnnhe loch dibendung untuk menyediakan tempat bagi pendirian ibu kota baru Inwa atau Ava. Setelah berdirinya Ava, Thatoe Min Phyar melakukan penyatuan kembali seluruh negeri, dan karena usaha Thatoe Min Phyar dan para penerusnya, mereka mampu mendirikan Dinasti Ava Pertama (1364-1555).

Bersamaan dengan bangkitnya Ava, di sisi lain, Bago (Hantharwaddy) juga muncul. Pada tahun-tahun berikutnya, rakyat harus menanggung perang selama 40 tahun antara Ava dan Hanthawaddy, yang pada dasarnya merupakan persaingan sengit antara penguasa feodal Ava dan Bago (Hanthawaddy) di bagian selatan Myanmar. Selama pemerintahan Raja Shwe Nan Kyawt Shin Narapati (1501-1527), putra Raja Mingaung Kedua, kondisi Ava sudah berada dalam keadaan menurun. Ketika negara feodal Taungoo menjadi lebih kuat, Raja Shwe Nang Kyawt Shin harus menyerahkan lima distrik daerah aliran sungai kepada Taungoo. Selama situasi yang tidak stabil ini (1526-1527), Ava diserang oleh Mohnyin Salone dan putranya Tho Han Bwar. Shwe Nan Kyawt Shin dieksekusi, dan Tho Han Bwar mengambil alih takhta Ava (1527-1542). Setelah kematian Minn Gyi Nyo di Taungoo pada tahun 1530, putranya Tabin Shwehti naik takhta, Tabin Shwehti mengumpulkan kekuatannya untuk menyatukan kembali negara. Selama pemerintahan Raja Bayinnaung, wilayah tersebut dimasukkan ke dalam Kerajaan Hantharwaddy yang baru dibentuk.

Pada abad ke-16 M, Raja Bayinnaung menyebarkan pengaruhnya ke seluruh negeri dan menjadi penguasa tertinggi yang tak tertandingi di Myanmar, dan mampu mendirikan Kekaisaran Myanmar Kedua. Setelah mengambil alih wilayah tengah, ia kemudian menaklukkan wilayah timur, barat, utara dan tenggara Myanmar, dan menjadi wilayah Hantharwaddy. Namun, semua negara feodal di bawah pemerintahan Raja Bayinnaung tidak selalu patuh, dan cenderung memberontak, sehingga sebagian besar masa pemerintahannya dihabiskan dengan terus-menerus berperang untuk menekan pemberontakan di seluruh kerajaan. Selama pemerintahan Nanda Bayin, pada tahun 1599, Taungoo dan Rakhine bergabung untuk menyerang Hantharwaddy, yang akhirnya menghancurkan kerajaan tersebut. Ketika Kerajaan Hantharwaddy dihancurkan, putra Raja Bayinnaung, penguasa Nyaungyan, Minye Nandamate, mendirikan sebuah kota baru di Ava, yang telah mengalami depopulasi dan memburuk selama empat tahun, dan mengonsolidasikan bagian atas Myanmar. Dengan Ava sebagai pusat kekuasaan, Dinasti Nyaungyan (1600-1752 M) didirikan. Pada tahun 1733, ketika Mahadhammaraza Dipadi naik takhta Ava, ancaman internal, domestik dan asing menjadi tidak dapat dipertahankan. Situasi menjadi kritis dengan pemberontakan masyarakat Hantharwaddy di selatan, pemberontakan yang dipimpin oleh Kunna Ain di Madayar dan Oak Pho dekat Ava, serta invasi Manipura (Kethe) yang sering memasuki perbatasan barat. Pada tahun 1751, pasukan Uparaza, saudara Hanthawaddy Banyardala (U Aung Hla), bergerak menuju Ava melalui darat dan laut, mengakhiri Dinasti Ava pada April 1752. Dari situasi ini, Raja Alaungpaya mampu menyatukan kembali seluruh negeri yang sedang terpecah dan mendirikan Kekaisaran Myanmar Ketiga yang juga dikenal sebagai Dinasti Konbaung (1752–1885 M). Selama Dinasti Konbaung, Perang Pertama dengan Inggris pecah pada 1824-1826, Perang Kedua pada 1852, dan Perang Ketiga pada 1885, dan seluruh negeri Myanmar jatuh ke dalam kolonial Inggris dari 1 Januari 1886 hingga 20 Mei 1942.

Setelah itu, Burma/Myanmar Independence Army-BIA yang dipimpin oleh Jenderal Aung San membebaskan seluruh negeri Myanmar dengan bantuan Jepang, yang harus melalui periode pendudukan Jepang dari 21 Mei 1942 hingga 7 Mei 1945; dan pendudukan kembali Inggris (bagian kedua) dari 8 Mei 1945 hingga 3 Januari 1948. Pada akhirnya, karena usaha tanpa kenal lelah Jenderal Aung San dan para pemimpin nasional, kemerdekaan dicapai pada 4 Januari 1948, dan negara tersebut kembali menjadi negara berdaulat. Setelah memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada tanggal 4 Januari 1948, Myanmar melalui berbagai periode seperti Periode Pemerintahan Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL) (4 Januari 1948 hingga 27 Oktober 1958), Periode Pemerintahan Caretaker (28 Oktober 1958 hingga 3 April 1960), Periode Pemerintahan Union (4 April 1960 hingga 1 Maret 1962), Periode Pemerintahan Revolutionary Council (2 Maret 1962 hingga 1 Maret 1974), Burma Socialist Programme Party (2 Maret 1974 hingga 17 September 1988), Periode State Law and Order Restoration Council (18 September 1988 hingga 14 November 1997), Periode State Peace and Development Council (15 November 1997 hingga 31 Maret 2011), Periode Pemerintahan Pertama yang dipilih secara demokratis (1 April 2011 hingga 31 Maret 2016), Periode Pemerintahan Kedua yang dipilih secara demokratis (1 April 2016 hingga 31 Januari 2021), sekarang negara tersebut bergerak maju di bawah kepemimpinan State Administration Council. Myanmar telah hidup di bawah pemerintahan militer selama hampir setengah abad. Hasil pemilu tahun 1990 tidak pernah diakui oleh junta yang berkuasa, dan Aung San Suu Kyi, pemimpin gerakan pro-demokrasi Myanmar, ditolak kemenangannya. Ia telah berada dalam tahanan (penjara). Akhir bulan April 2026 junta Myanmar memindahkannya dari penjara ke tahanan rumah di sebuah tempat tinggal yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalani sisa hukumannya. Kini, Myanmar semakin menjadi satelit ekonomi dan bergantung secara politik kepada Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar berada di persimpangan jalan. Akankah negara ini akan menjadi seperti Korea Utara lainnya, akankah ia menyerah pada pelukan politik Tiongkok, atau akankah rakyatnya berhasil menentukan nasibnya sendiri?

Myanmar di Bawah Pemerintahan Kolonial Inggris

Seperempat abad yang lalu, Inggris mencaplok sisa-sisa terakhir Kerajaan Burma/Myanmar, yang pernah menjadi kekaisaran terbesar di daratan Asia Tenggara. Myanmar dibagi-bagi oleh Inggris melalui tiga perang Inggris-Burma (1824–1826, 1852–1853, dan 1885), dan selama sebagian besar abad kesembilan belas, terdapat dua Myanmar yang saling bersaing, yaitu sebuah negara merdeka yang semakin menyusut di utara dan sebuah entitas kolonial yang semakin meluas di selatan. Sementara istana Myanmar yang terdesak, berpacu untuk memperkenalkan reformasi administratif dan melakukan modernisasi dengan teknologi Barat, politik istana dan perekonomian yang belum berkembang dengan baik memastikan kekalahan akhirnya.

Pemerintahan kolonial menciptakan sebagian besar “Burma”/Myanmar yang dikenal oleh dunia luar dewasa ini. Perluasan “*Great Trigonometrical Survey of India*” ke Myanmar pada akhir abad kesembilan belas menentukan geografi politik Burma dan mencatat topografinya. Para penulis Barat yang dalam berbagai cara terkait dengan negara kolonial menghasilkan gambaran-gambaran tentang kebudayaan Myanmar, tentang bagaimana orang Myanmar berpikir dan bagaimana mereka berperilaku, yang kemudian membentuk pemahaman kontemporer. Dapat dikatakan bahwa mungkin lebih banyak orang asing selama bertahun-tahun telah membaca “*Burmese Days*” karya George Orwell dibandingkan dengan publikasi tunggal lainnya mengenai negara tersebut.

Gambaran asing tentang Myanmar hanya sedikit berkaitan dengan bagaimana orang Myanmar memandang negeri mereka sendiri—yaitu, bagaimana Myanmar dipandang dari dalam. Kronik-kronik dan sastra pribumi, biara setempat atau tempat pemujaan roh, kesinambungan umum kebudayaan material pra-kolonial, serta berbagai peninggalan lain dari masa sebelum aneksasi Inggris terus membentuk kehidupan sehari-hari dan cara pandang terhadap bentang alam pedesaan yang luas hingga jauh memasuki abad kedua puluh. Tantangan paling serius terhadap kesinambungan kehidupan sosial dan budaya pra-kolonial terjadi di ibu kota kolonial, Rangoon/Yangon. Meskipun, perubahan-perubahan penting memang terjadi pada masyarakat Myanmar di pedesaan dengan hadirnya pemerintahan kolonial, dan perubahan tersebut terutama berkaitan dengan transformasi administratif dan ekonomi.

Perubahan Ekonomi Pedesaan

Pemerintahan kolonial mengganggu hubungan timbal balik tradisional antara kaum bangsawan pemilik tanah dan para petani. Unit dasar administrasi dan ranah kehidupan sosial di seluruh pedesaan Myanmar adalah desa. Meskipun negara pra-kolonial telah menjalankan kontrol administratif yang lebih ketat atas negeri ini dibandingkan pendahulu-pendahulunya, negara itu hanya menyentuh kehidupan desa secara ringan dan tidak langsung. Kepala desa bertindak bukan hanya sebagai agen negara atau pemegang hibah pendapatan, tetapi juga sebagai wakil atau pelindung komunitas desa. Ketika panen buruk, ia dapat bekerja melalui rantai ikatan patron-klien untuk melunakkan tuntutan pendapatan pada tahun itu. Kepala desa bertanggung jawab menyediakan keperluan untuk festival desa dan berbagai kebutuhan komunal lainnya. Sebagai imbalannya, penduduk desa menyediakan tenaga kerja untuk menggarap lahannya atau untuk mendukungnya pada saat terjadi konflik, baik dalam hal menyumbangkan orang-orang untuk pasukan lokal yang dibutuhkan oleh takhta untuk perang maupun untuk konflik yang lebih pribadi dengan orang-orang berkuasa lainnya dalam lanskap lokal. Perubahan ekonomi yang terkait dengan rekonfigurasi politik Burma sejak pertengahan abad kesembilan belas mendorong keruntuhan awal masyarakat pedesaan.

Aneksasi Burma/Myanmar oleh Inggris secara bertahap dan reformasi ekonomi di Burma/Myanmar Atas, bersama-sama mengubah wajah masyarakat pedesaan di Myanmar. Munculnya ekonomi ekspor beras berskala besar di Burma/Myanmar Bawah setelah pertengahan tahun 1850-an menyebabkan peningkatan luas lahan yang ditanami sebesar 600 persen di Burma/Myanmar Bawah antara tahun 1860 hingga akhir tahun 1920-an, dengan sebagian besar pertumbuhan terjadi antara tahun 1870 dan 1910. Selain itu, penanaman dilakukan secara intensif, yang menyebabkan peningkatan volume beras yang ditanam sebanyak dua puluh tiga kali lipat selama periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi ekspor beras di selatan mendorong migrasi besar-besaran para petani dari utara ke delta, tertarik oleh kemakmuran yang tumbuh. Karena permukiman di Burma/Myanmar Bawah yang jarang, terdapat sebuah wilayah perbatasan penanaman padi yang belum dimanfaatkan di selatan yang dapat dibuka untuk budidaya padi oleh para pemukim dari utara. Selama beberapa dekade berikutnya, puluhan ribu penduduk desa mengemasi barang-barang mereka dan bersama hewan-hewan penarik mereka pindah ke delta. Penyerahan diri kepada negara kolonial bagi orang-orang Myanmar yang pindah ke selatan antara tahun 1850-an dan 1880-an, dan bagi orang-orang Myanmar yang berada di bawah kekuasaan Inggris setelah tahun 1885, hidup di bawah pemerintahan kolonial berarti hilangnya kepala desa sebagai penyangga penengah yang penting antara mereka dan negara.

Semua orang Burma, kecuali para biksu Buddha, harus melakukan shikho (salam hormat yang dikhususkan untuk para tetua penting, biksu, dan Buddha) kepada para pejabat Inggris, sebagai tanda pengakuan atas ketundukan mereka kepada kekuasaan Inggris. Penduduk desa diwajibkan mendirikan tembok duri di sekeliling desa mereka dan bertugas bergiliran sebagai penjaga malam. Penduduk desa juga diwajibkan menyediakan transportasi antar-desa, serta makanan dan kayu bakar, ketika pejabat militer atau sipil kolonial datang. Yang lebih penting lagi, kepala desa kini menjadi orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan berubah menjadi agen yang sepenuhnya bergantung pada negara untuk status, penghasilan, dan hak kepemilikannya, serta kini bertanggung jawab hanya kepada negara kolonial. Penduduk desa diwajibkan menghadap kepala desa saat gongnya dipukul dan melaksanakan apa pun layanan yang diminta olehnya atau dihukum dengan dua puluh empat jam dalam pasungan. Dengan berakhirnya fungsi penyangga pelindung dari kepala desa, penduduk pedesaan juga menjadi lebih rentan pada masa panen buruk, dan tuntutan pendapatan kini ditandai oleh keteraturan dan keseragamannya, bukan lagi oleh fleksibilitasnya dalam menanggapi kondisi lokal. Selain itu, penduduk desa yang dicurigai mencuri dapat dipenjara selama satu tahun tanpa pengadilan. Para pejabat kolonial mengharapkan mereka akan menerima kepatuhan yang sama dari orang Myanmar sebagaimana yang dinikmati oleh istana pribumi, dan mendesak mereka untuk mempertahankan "*sifat-sifat alami*" mereka berupa kepatuhan kepada otoritas.

Ketika Lord Curzon, Raja Muda India, mengunjungi Mandalay pada tahun 1901, ia mengadakan audiensi bagi para kepala dari negara-negara Shan selatan, para tokoh terkemuka Burma/Myanmar Atas, dan "para bangsawan pribumi Myanmar" lainnya. Ia melakukannya di Ruang Takhta Barat bekas istana kerajaan, seolah-olah menempatkan dirinya pada posisi otoritas yang sama seperti para penguasa pribumi kerajaan terdahulu. Setelah berbicara kepada para kepala Shan — untuk pertama kalinya seorang Raja Muda India melakukan hal itu — ia berpaling kepada para hadirin orang Myanmar dan menjelaskan kepada mereka (dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Burma) bahwa pihak Inggris tidak menginginkan rakyat kehilangan ciri khas dan tradisi bangsa mereka sendiri. Ia menyatakan bahwa orang Myanmar dahulu terkenal akan rasa hormat mereka — hormat kepada orang tua, hormat kepada para tetua, hormat kepada guru, hormat kepada mereka yang berkuasa — dan bahwa tidak ada masyarakat yang dapat bertahan dalam keadaan sehat tanpa rasa hormat, karena hal itu merupakan penghormatan yang sepatutnya diberikan oleh pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Ia menambahkan bahwa rakyat Myanmar yang paling setia kepada Raja-Kaisar, orang yang paling ingin dihormatinya, bukanlah peniru Eropa yang paling cerdik, melainkan orang yang paling setia kepada segala sesuatu yang paling sederhana, paling patuh, dan paling terhormat dalam naluri dan adat istiadat bangsa yang kuno dan menarik itu.

Otoritas kolonial didukung oleh penetrasi luas lembaga dan praktik asing yang mengatur, mencampuri kehidupan pedesaan pada tingkat yang lebih besar daripada yang pernah dicoba oleh lembaga pusat pribumi mana pun pada masa pra-kolonial. Hubungan dengan para administrator lokal, penyelesaian perselisihan dengan tetangga, penetapan sertifikat tanah, pembayaran pajak, dan berbagai kegiatan lainnya kini memerlukan pengisian berbagai formulir, kunjungan ke pengadilan hukum tingkat kecamatan atau distrik, dan tunduk pada pengumpulan informasi oleh para juru tulis dan penyelidik pemerintah secara berkala, dan di mana pun, pengaturan-pengaturan adat digantikan oleh pengaturan-pengaturan hukum. Dalam banyak ranah kehidupan Myanmar, identitas dan identifikasi yang bersifat cair, majemuk, atau bahkan tidak terdefinisi adalah hal yang lazim. Baik dari segi agama, etnis, maupun budaya, tidak jarang seorang individu atau kelompok mengubah identifikasi diri mereka dalam konteks yang berbeda-beda. "Karen," atau lebih tepatnya "Kayin," misalnya, sering digunakan secara bebas oleh para penulis dan pihak lain; istilah-istilah ini kabur dan menutupi keragaman yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang substansial di antara kelompok-kelompok Karen, identifikasi Karen yang didasarkan pada praktik-praktik hanya satu kelompok, yaitu kelompok Karen Sgaw yang telah menjadi Kristen, diterapkan pada Karen secara umum, sebagian besar karena komunitas ini memiliki lebih banyak catatan dibandingkan yang lain dan karena mereka telah menjadi subjek utama dari laporan-laporan misionaris.

Generalisasi-generalisasi ini akan tetap berlaku dalam kajian ilmiah hingga jauh memasuki abad kedua puluh, dengan orang Karen sering disebut sebagai orang Kristen, dan banyak yang akan terkejut ketika, pada tahun 1990-an, orang Karen yang beragama Buddha memberontak melawan kepemimpinan Baptis mereka. Sejalan dengan praktik-praktik Eropa, sensus kolonial mewajibkan orang Myanmar untuk memberikan jawaban tunggal dan tidak bersyarat mengenai afiliasi mereka dengan seperangkat kategori etnis eksklusif yang telah ditentukan. Meskipun bahasa Myanmar pada umumnya telah menjadi media utama pergaulan sehari-hari di seluruh Lembah Irrawaddy, banyak orang yang, di mata orang asing, tampak seperti orang Myanmar, berpakaian seperti orang Myanmar, dan berbicara bahasa Myanmar, sesungguhnya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Myanmar. Demikian pula, migrasi orang Burman pra-kolonial ke Delta Bawah sangat intens pada paruh terakhir abad kedelapan belas, dan terdapat perkawinan campur yang signifikan antara berbagai kelompok etnis, sehingga individu-individu yang dapat mengklaim keturunan dari kalangan Mon, Burman, Karen, dan berbagai kelompok etnis lainnya sangat umum ditemukan di delta. Mengingat kedua situasi ini — satu di mana orang non-Myanmar dapat keliru dianggap sebagai orang Myanmar, dan yang lain di mana seorang individu dapat mengklaim beberapa asal-usul etnis sekaligus — masalah pun tak terelakkan muncul ketika para petugas sensus terkadang meminta kepala desa atau pihak lain untuk memberi tahu mereka tentang identitas etnis orang-orang di wilayah tersebut atau mengharuskan responden untuk memberi tahu mereka secara pasti kelompok etnis mana yang menjadi milik mereka.

Yang secara khusus dibenci oleh orang Myanmar pedesaan adalah keharusan tunduk kepada lembaga medis kolonial, terutama ketika berkaitan dengan penyakit-penyakit epidemi seperti cacar. Praktik inokulasi lazim dilakukan di pedesaan Myanmar sejak akhir abad kedelapan belas dan pada masa kolonial telah menjadi metode pilihan dalam mencegah cacar. Para pejabat medis kolonial, yang sebagian besar meremehkan pengobatan pribumi sebagai pengobatan gadungan, lebih memilih untuk menerapkan pada masyarakat Myanmar sebuah prosedur yang secara visual sangat mirip namun secara mendasar berbeda: vaksinasi. Penduduk pribumi lebih memilih untuk diobati oleh juru inokulasi pribumi dengan cara yang mereka terima daripada tunduk kepada orang asing yang menerapkan metode yang sama-sama asing.

Petani Penggarap

Perhatian utama otoritas kolonial adalah bagaimana menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai biaya administrasi. Hal ini berarti mengembangkan kelas besar petani pemilik lahan di pedesaan, dan tercapai dengan tingkat keberhasilan tertentu pada awal abad kedua puluh. Partisipasi dalam ekonomi ekspor beras memberikan pendapatan tunai yang dapat digunakan untuk membayar pajak tanah dan membeli kebutuhan hidup, bahkan sejumlah kebutuhan yang biasanya paling mahal sekalipun, seperti bahan bangunan untuk

rumah, serta ikan dan sayuran untuk melengkapi pola makan yang didominasi beras, dapat dengan mudah diperoleh dari lingkungan setempat dengan biaya kecil atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Uang tunai juga memberikan peluang untuk membeli sejumlah barang mewah, baik yang merupakan hasil industri rumah tangga pribumi maupun barang-barang Barat. Di sisi lain, kakunya sistem perpajakan kolonial, yang jarang memberikan keringanan pada saat panen buruk, serta ketergantungan pada satu jenis tanaman di tengah fluktuasi pasar dunia, menyebabkan situasi ekonomi seorang petani penggarap dapat berubah secara drastis dari tahun ke tahun. Selain itu, biaya untuk membuka lahan dan mempertahankan penanaman surplus untuk ekspor, di luar kebutuhan subsistensi pribadi, sangatlah tinggi. Untuk memenuhi tuntutan ini, para petani penggarap Myanmar, semakin sering mendapati diri mereka beralih kepada rentenir.

Pengalihan Tanah

Sejak tahun 1890-an, tanah pertanian di pedesaan secara bertahap teralihkan kepada para rentenir. Masalah ini terkadang dikaitkan dengan praktik-praktik licik kaum Chettyar dari India. Kaum Chettyar adalah kasta rentenir yang berasal dari Chettinad di Madras Presidency. Meskipun urusan bisnis mereka pada masa kolonial meluas ke sebagian besar Asia Tenggara serta Sri Lanka, wilayah utama yang menjadi perhatian mereka adalah Myanmar. Namun, keberadaan mereka tidak merata; di beberapa distrik mereka hanya memiliki kehadiran kecil, sementara di beberapa distrik lain, seperti Hanthawaddy dan Tharrawaddy, mereka menjadi sumber pinjaman yang sangat dominan bagi para petani Myanmar. Kaum Chettyar beroperasi melalui jaringan keluarga yang tersebar luas yang dapat dengan mudah menyalurkan modal antara India dan Myanmar. Jaringan-jaringan ini diarahkan untuk mengambil risiko yang wajar dalam praktik peminjaman uang, sehingga mereka meminjamkan uang dengan suku bunga rendah kepada para petani yang tampak mampu mengembalikan uang tersebut. Tujuannya adalah menggunakan keuntungan dari praktik rentenir di Myanmar untuk membangun modal lebih lanjut guna investasi kembali, atau untuk membeli tanah di India, dan apabila tanah diperoleh di Myanmar, hal itu terutama dilakukan untuk menghindari atau mencegah kerugian total atas pengembalian pinjaman yang buruk. Kaum Chettyar bukanlah satu-satunya rentenir asing, karena orang India lain dan orang Tionghoa juga terlibat, meskipun tidak sebanyak kaum Chettyar. Namun, dalam hal pengalihan tanah, pelaku paling signifikan sebelum masa Depresi Besar adalah para rentenir Myanmar sendiri. Mereka lebih sering memberikan pinjaman berisiko dan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi. Meskipun tujuan utama mereka juga bukan untuk menyita tanah, mereka kerap kali memperoleh tanah akibat gagal bayar pinjaman karena pinjaman yang diberikan sejak awal sudah sangat berisiko.

Otoritas kolonial lamban dalam menanggapi hal ini, namun dari tahun 1900 hingga 1930 dua solusi diajukan untuk mengatasi masalah pengalihan tanah. Solusi pertama berupaya membatasi praktik tersebut melalui perundang-undangan, dengan alasan bahwa orang Myanmar tidak mampu menjalankan kendali diri dalam ranah ekonomi. Mengajukan kerja sama alih-alih paksaan – merekomendasikan pendidikan bagi orang Myanmar mengenai cara dan sarana untuk melawan pengalihan tanah. Pada akhirnya, semakin banyak tanah yang berpindah tangan kepada para rentenir.

Pada awal tahun 1920-an, muncul perkumpulan-perkumpulan desa sebagai respons terhadap beragam kepentingan. Organisasi-organisasi ini didorong oleh anjuran dari General Council of Burmese Associations (GCBA) untuk mendorong agitasi nasionalis yang berbasis di pedesaan. Namun, banyak yang mengorganisir atau bergabung dengan perkumpulan pedesaan lainnya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi atau hukum pedesaan yang serius, terutama tuntutan pajak kolonial dan eksploitasi oleh para rentenir. Dalam upaya memberdayakan penduduk pedesaan, perkumpulan-perkumpulan desa ini juga berusaha mengambil alih wewenang yang diklaim oleh pengadilan hukum kolonial dan pejabat pemerintah setempat. Pengadilan desa semacam itu, dipimpin oleh "*hakim*" pribumi, menangani seluruh rentang perselisihan warga desa, menjatuhkan hukuman, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi. Perkumpulan-perkumpulan desa juga menentang para agen lokal rezim kolonial, yaitu kepala desa beserta kerabat dekatnya, serta para rentenir. Meskipun para bhikkhu juga bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan ini dalam menjatuhkan sanksi sosial dan sering digambarkan sebagai penggerak aktivitas tersebut, terkadang justru perkumpulan lokal yang memanfaatkan wibawa moral sang bhikkhu untuk melegitimasi tindakan mereka. Sejak awal, perkumpulan-perkumpulan desa mendorong masyarakat umum untuk memboikot barang-barang asing dan kembali ke cara-cara tradisional serta pribumi. Mereka mendesak orang Myanmar untuk tidak membeli tekstil buatan Inggris yang diimpor, melainkan mengandalkan kain tenunan sendiri, dan pameran produk-produk rumahan diadakan pada konferensi-konferensi untuk mendorong industri rumah tangga. Cerutu Myanmar dianjurkan untuk dihisap sebagai pengganti rokok Virginia, penduduk didorong untuk tidak menggunakan lilin dari Burma Oil Company untuk menerangi kuil Buddha, tidak seorang pun diperbolehkan mengenakan jas, sepatu bot, atau sepatu yang nilainya melebihi dua puluh rupee, dan rambut harus dipanjangkan seperti pada masa prakolonial. Sesuai dengan kitab suci Buddha, memakan daging, meminum alkohol, dan mengonsumsi opium semuanya dilarang. Perkumpulan-perkumpulan desa mampu menegakkan boikot terhadap pajak kolonial dan pembelian barang-barang asing dengan menerapkan tekanan sosial. Warga desa yang bekerja sama dengan pemerintah atau para rentenir, misalnya, menghadapi pengucilan sosial, pelemparan batu ke rumah mereka, penolakan bantuan dalam bercocok tanam, larangan untuk dipekerjakan, pencederaan ternak mereka, kerusakan tanaman mereka, bahkan kematian.

Pemberontakan Hsaya San (Guru San)

Meskipun pemberontakan Hsaya San yang pecah pada akhir tahun 1930 sering dipandang sebagai pemberontakan bersenjata pertama di pedesaan Burma/Myanmar pada abad kedua puluh, pemberontakan tersebut memiliki banyak pendahulu, termasuk pemberontakan para petani kecil pada tahun 1910 di Distrik Sagaing, Shwebo, dan Lower Chindwin, pemberontakan Mayoka tahun 1913, dan pemberontakan yang gagal di Tharrawaddy pada awal tahun 1928. Hsaya (guru) San, pernah menjadi praktisi pengobatan tradisional, lahir dari keluarga pedesaan di Myanmar, dan telah menerbitkan buku-buku yang mendorong orang Myanmar untuk tidak menerima pengobatan Barat yang mahal dan sebaliknya mengandalkan pengobatan tradisional Myanmar, yang lebih murah dan lebih dapat diandalkan. Ia berkeliling pedesaan Myanmar, tempat ia mengamati kemiskinan para petani Myanmar dalam ekonomi kolonial, dan bergabung dengan GCBA (General Council of Burmese Associations) beberapa waktu setelah pendiriannya pada tahun 1920. Pada konferensi tahunannya pada tahun 1925 di Paungde, kongres GCBA berpaling kepada San sebagai seorang petani terpelajar yang jelas-jelas tidak menyukai pemerintahan Inggris untuk menyelidiki masalah penduduk pedesaan Burma. San kemudian menjadi kepala komisi penyelidikan yang bertujuan untuk memeriksa keluhan petani mengenai pemungutan pajak. Dari tahun 1927 hingga 1928, San dan komisi tersebut mengunjungi distrik-distrik tempat dilaporkan telah terjadi bentrokan antara petani dan pasukan pemerintah. Laporan yang telah diselesaikan tersebut menguraikan perlakuan buruk terhadap para petani Myanmar dan ketidakhormatan terhadap agama Buddha. Laporan tersebut merekomendasikan agar pajak kepala dan pajak Thathameda dilawan dan agar undang-undang kehutanan yang mencegah para petani mengumpulkan bambu dan kayu ditentang melalui cara-cara tanpa kekerasan. Namun, ketika konferensi tahunan cabang Soe Thein dari GCBA (yang pada saat itu telah terpecah menjadi berbagai organisasi, banyak di antaranya tetap menggunakan nama GCBA) bertemu pada tahun 1929. San kecewa karena tidak ada usulan yang dibuat untuk menindaklanjuti laporannya. Ia mengajukan mosi untuk mengorganisasi "*People's Volunteers*" guna menentang pemerintah kolonial, tetapi ditentang oleh para biksu yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindakan makar. Hal ini mendorong perpecahan lain dalam organisasi tersebut dan, dengan alasan bahwa asosiasi itu terlalu lemah untuk menjadi efektif, San mengundurkan diri dan merencanakan pemberontakan bersenjata. Pemberontakan dimulai dengan serangan terhadap para pejabat pemerintah di distrik Tharrawaddy dan segera menyebar ke distrik-distrik lainnya. Sementara itu, San, yang menyamar sebagai seorang biksu bernama U Nyana, telah meninggalkan ibu kotanya dan tiba di Negara Bagian Shan Utara pada awal Maret 1931 untuk memobilisasi para petani Shan menjadi pasukan lain. Setelah mengorganisasi pasukan ini, ia memilih lokasi untuk ibu kota kerajaan barunya dan menunjuk para jenderal baru.

Namun, pada saat itu pemberontakan sedang mereda. Para prajurit San dipersenjatai secara buruk untuk menghadapi senapan mesin Inggris dan para pejabat pemerintah mengirim para biksu Buddha ke daerah-daerah pedesaan untuk menyerukan perdamaian dan meyakinkan para petani bahwa perjuangan tersebut sia-sia. San ditangkap dan, selama tahun berikutnya, tentara dan polisi kolonial secara bertahap menekan pemberontakan tersebut. Namun, metode mereka menimbulkan kebencian jangka panjang di kalangan orang Myanmar, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan. Untuk menjadikan para pemberontak sebagai contoh dan memperingatkan yang lain, foto-foto kepala mereka yang telah dipenggal dipasang di kantor-kantor polisi utama di seluruh negeri. Karena polisi telah memperlakukan penduduk desa dengan buruk selama pemberontakan, ketidak-sukaan masyarakat setempat terhadap pemerintah Inggris dan terutama terhadap polisi tetap bertahan setidaknya hingga akhir tahun 1930-an. Persidangan San di hadapan pengadilan khusus yang dibentuk di Tharrawaddy menjadikannya seorang martir bagi nasionalisme Myanmar. San dijatuhi hukuman mati dan digantung di penjara Tharrawaddy pada tanggal 28 November 1931. Dampak politik utama dari pemberontakan Hsaya San adalah bahwa pemberontakan tersebut membantu semakin mendorong gerakan nasionalis dan proses ini sangat dibantu oleh pers Myanmar.

Anti-Kolonialisme dan Nasionalisme

Pacification (upaya untuk menghentikan konflik untuk menciptakan ketertiban/keamanan) tidak pernah sepenuhnya selesai. Perlawanan Myanmar terhadap pemerintahan Inggris terus berlangsung hingga Inggris meninggalkan negara tersebut. Meskipun demikian, nasionalisme modern memang merupakan sesuatu yang baru dan asing bagi sebagian besar penduduk Myanmar. Nasionalisme Myanmar modern perlahan-lahan muncul selama beberapa dekade pertama abad kedua puluh. Kekalahan sebuah kekuatan Eropa oleh sebuah kekuatan Asia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904–05 merupakan salah satu sumber dorongan. Tuntutan reformasi Myanmar berikutnya mungkin mengejutkan para pejabat Inggris, karena pejabat kolonial berpendapat bahwa masyarakat Myanmar belum siap secara pendidikan maupun politik untuk pemerintahan sendiri. Kemungkinan besar Myanmar pada akhirnya akan berpisah dari India, setelah mengalami perkembangan politik lebih lanjut. Sementara itu, jika pandangan tersebut diambil dan pengakuan yang wajar diberikan terhadap perbedaan Myanmar dengan provinsi-provinsi India, Myanmar akan memperoleh manfaat dari tetap menjadi anggota "*keluarga provinsi*" Government of India. Kebangkitan politik yang sedang berlangsung di kalangan masyarakat Myanmar segera disalurkan ke dalam politik elektoral. Pada tahun 1921, Secretary of State for India akhirnya merekomendasikan kepada Parlemen agar Act of 1919 diperluas ke Myanmar.

Bidang-bidang pemerintahan tertentu yang dianggap tidak kritis akan “*dialihkan*” kepada dua orang menteri Myanmar yang dipilih oleh Legislative Council, sementara semua bidang lain yang dianggap penting bagi Pemerintah India akan “*dicadangkan*” dan tetap berada di bawah kendali Gubernur. Ironisnya, meskipun Inggris pada awalnya bermaksud memberikan Myanmar lebih sedikit daripada yang diberikan kepada India, ketentuan perluasan Undang-Undang tersebut ke Burma pada tahun 1923 ternyata lebih liberal daripada ketentuan yang diberikan kepada India. Perempuan diberikan kesetaraan penuh dengan laki-laki karena status sosial mereka di Myanmar dianggap tinggi. Hak pilih jauh lebih luas daripada di India karena pendidikan dasar lebih tersebar di Myanmar. Pemerintah kolonial memiliki rencana lain bagi kelompok-kelompok etnis minoritas di wilayah perbukitan. Di sana, menurut pemerintah kolonial, “*keberbedaan rasial*” dan kekhasan administrasi lokal berarti bahwa mengintegrasikan mereka dengan wilayah Myanmar lainnya merupakan gagasan yang buruk. Mungkin juga terdapat kebenaran dalam klaim bahwa pemerintah sedang menanggapi keinginan masyarakat setempat, karena wilayah-wilayah ini sejak dahulu menikmati otonomi yang cukup besar dari kontrol pusat pada masa pra-kolonial dan otonomi tersebut. Kelompok-kelompok etnis minoritas di wilayah perbukitan bukan satu-satunya pihak yang takut terhadap dominasi Burman. Tentu saja terdapat komunitas-komunitas Cina dan India yang cukup besar, yang keduanya semakin sering dicirikan oleh kaum nasionalis Myanmar sebagai kelompok asing dan tidak diinginkan di negara tersebut. Kelompok yang lebih kecil, meskipun sangat penting, yang terkonsentrasi di Rangoon/Yangon adalah “*Anglo-Burmans*”, yang sering kali merupakan anak-anak dari perkawinan antara laki-laki Eropa dan perempuan Burma, tetapi kadang-kadang juga sebaliknya. Banyak nasionalis Myanmar memandang mereka sebagai bagian dari elite kolonial, yang memperoleh keuntungan dalam perdagangan dan administrasi yang berasal dari hubungan mereka dengan pemerintahan kolonial Inggris, pendidikan Barat mereka, atau keduanya. Memang banyak Anglo-Burmans yang menjadi sukses selama periode kolonial, tetapi, seperti banyak rekan mereka dari kalangan masyarakat Burma/Myanmar yang telah mengalami Westernisasi, mereka juga berperan sebagai jembatan intelektual antara Barat dan Myanmar. Namun demikian, ketakutan akan dikalahkan atau disingkirkan oleh pemerintahan mayoritas Myanmar akan mendorong mereka untuk mencari pengakuan khusus dan perlindungan hukum ketika Myanmar menuju pemerintahan sendiri pada tahun-tahun berikutnya.

Kedudukan Rangoon/Yangon kolonial sebagai pusat kehidupan dan politik kolonial secara alami menjadikannya tempat terjadinya beberapa konfrontasi paling penting antara masyarakat Myanmar dan Inggris. Dengan demikian, di Yango-lah dampak pemerintahan Inggris dan dominasi ekonomi perdagangan Barat serta kelompok-kelompok minoritas imigran Asia terlihat paling jelas.

Pada saat yang sama, Yangon kolonial termasuk dalam jaringan pelabuhan kolonial yang menghubungkan Myanmar dengan arus intelektual dan material yang berasal dari Eropa, dan khususnya dari Inggris. Barang-barang konsumen baru, mode terbaru, gagasan-gagasan politik baru, dan berita dari seluruh penjuru dunia turut berkontribusi terhadap munculnya kesadaran diri baru masyarakat Myanmar yang tidak lagi semata-mata bersumber dari masa lalu Myanmar sebelum kolonial, tetapi juga dari kondisi internasional masa kini. Westernisasi kemudian disamakan dengan modernisasi dan kemajuan. Ketertarikan masyarakat Myanmar terhadap Jepang yang sedang mengalami industrialisasi, misalnya, bukan disebabkan oleh keberlanjutan budaya tradisional Jepang, melainkan oleh kenyataan bahwa suatu bangsa Asia mampu membangun negara dan perekonomian yang setara dengan milik bangsa-bangsa Eropa. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Myanmar "*kolonial*" tidak banyak dipengaruhi oleh masa lalu pra-kolonial. Sebaliknya, pengakuan terhadap pentingnya masa lalu tersebut dikembangkan dalam berbagai perkumpulan masyarakat baru yang dibangun berdasarkan model organisasi Barat. Dengan demikian, Yangon mengalami suatu transisi penting selama periode kolonial, dari pusat kendali asing menjadi pusat aktivitas nasionalis Myanmar. Pada tahun-tahun berikutnya, Yangon akan mempertahankan kedudukannya sebagai pusat negara Myanmar selama lebih dari setengah abad. Namun demikian, sifat "*asing*"-nya akan tetap menjadi persoalan penting sepanjang periode pasca-kemerdekaan.

Kelompok Etnis di Myanmar

Populasi Myanmar berjumlah sekitar 55,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68% dianggap sebagai bagian dari kelompok etnis dominan – Bamar (juga dikenal sebagai Burman). Termasuk Bamar, pemerintah Myanmar mengakui total 135 kelompok etnis yang berbeda. Mereka berbicara lebih dari 100 dialek dan bahasa yang berbeda. Ada juga sejumlah kelompok etnis lain yang tidak secara resmi diakui oleh pemerintah Burma, seperti populasi India dan Tionghoa serta Muslim Rohingya, di antara kelompok-kelompok lainnya. Diperkirakan kelompok-kelompok yang tidak resmi ini membentuk sekitar 10% dari populasi negara. Ke-135 kelompok etnis resmi tersebut diidentifikasi sebagai bagian dari "delapan kategori" yang disebut "*major national ethnic races*" ("ras etnis nasional utama"), yaitu: Bamar, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Shan, Rakhine, Mon. Kedelapan ras ini dibagi bukan berdasarkan bahasa atau asal-usul genetik, melainkan berdasarkan geografi – yang telah menimbulkan kebingungan bagi banyak ahli etnologi. Selain Bamar, masing-masing "*major national ethnic race*" memiliki negara bagian dengan nama yang sama. Masing-masing terdiri dari banyak kelompok etnis yang berbeda (kecuali Mon, yang hanya memiliki satu), dan banyak dari kelompok tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Ini merupakan persoalan yang rumit, bagaimana kita memberikan label pada etnisitas dan budaya secara umum – sesuatu yang menimbulkan banyak kontroversi.

Bahkan, kelompok-kelompok minoritas etnis Myanmar memilih menyebut diri mereka “*ethnic nationalities*” daripada “*ethnic minorities*”, karena meningkatnya kekhawatiran akan tersisih atau tergilas oleh budaya Bamar yang dominan. Gagasan tentang homogenisasi budaya ini sering dijuluki “*Burmanization*”.

Delapan Etnis Utama Myanmar

Sebagian besar minoritas etnis Myanmar tinggal di daerah pegunungan di sekitar perbatasan negara. Mereka memiliki bahasa, tradisi, pakaian budaya, dan agama mereka sendiri yang sangat menarik untuk disaksikan. Orang-orang menggambarkan Myanmar sebagai “*negeri senyuman*” terutama karena kehangatan dan keramahan penduduk desa di daerah pedesaan negara tersebut. Kelompok etnis Myanmar yang berbeda:

Bamar

Nama Burma diberikan kepada negara tersebut selama pemerintahan kolonial Inggris, kemungkinan diambil dari nama “*Bamar*”, yang dahulu dan hingga sekarang merupakan etnis mayoritas di negara tersebut. Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Myanmar sebagai nama resmi negara tersebut. Bamar adalah kelompok etnis Sino-Tibet yang mencakup sekitar dua pertiga populasi Myanmar dengan jumlah hampir 40 juta orang. Orang Bamar sebagian besar tinggal di wilayah lembah Sungai Irrawaddy dan secara tradisional merupakan petani padi sawah, yang awalnya bermigrasi dari Provinsi Yunnan di Tiongkok pada abad ke-7. Bamar merupakan sumber dari sebagian besar unsur budaya dan identitas Burma yang dikenal luas – seperti pakaian tradisional mereka berupa sarung panjang (longyi untuk laki-laki dan htamain untuk perempuan). Di kaki, sandal beludru dikenakan (meskipun kulit dan plastik juga digunakan) – ini disebut “*gadiba phanat*”. Perempuan Bamar sering mengoleskan bubuk putih kekuningan yang disebut thanaka pada wajah mereka untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Untuk acara-acara formal, perhiasan emas dan selendang sutra dikenakan, dan laki-laki sering mengenakan sorban dan jaket dengan kerah mandarin. Pakaian Barat mulai masuk ke dalam budaya Bamar (kaus dan celana jins semakin sering terlihat) tetapi tidak sebanyak pada beberapa budaya Asia Tenggara lainnya, dan terutama di kota-kota negara tersebut. Masakan tradisional Bamar biasanya berupa nasi, mi, dan ikan dengan banyak salad. Mereka mempraktikkan Buddhisme Theravada yang merupakan bagian penting dari budaya mereka, dan mereka berbicara dalam bahasa Burma. Dua upacara penting dalam perjalanan menuju kedewasaan dilakukan untuk merayakan anak-anak Bamar yang beranjak dewasa – upacara menjadi samanera Buddhis untuk anak laki-laki yang disebut shinbyu, dan upacara penindikan telinga untuk anak perempuan yang disebut nar tha. Festival-festival sangat populer, seperti festival pagoda yang rutin diadakan. Kebiasaan menarik lainnya adalah pemberian nama kepada anak-anak Bamar.

Hal ini dilakukan berdasarkan hari dalam seminggu ketika anak tersebut lahir – dan minggu dalam kalender Burma dibagi menjadi 8 hari untuk mencakup Yahu (Rabu sore!). Bamar terdiri dari sembilan kelompok etnis yang berbeda secara keseluruhan, termasuk satu kelompok minoritas nomaden yang agak unik yang disebut Moken. Moken terdiri dari antara 2.000 dan 3.000 orang yang mendiami perairan di sekitar sekelompok pulau yang disebut Kepulauan Mergui di lepas pantai selatan Myanmar. Mereka sering disebut ‘gipsi laut’ (atau Salon dalam bahasa Burma), hidup di atas perahu kayu dan menjalani gaya hidup berburu, hidup sepenuhnya dari laut. Metode penangkapan ikan tradisional mereka masih dipraktikkan hingga saat ini – mereka menyelam hingga kedalaman 60 meter untuk mengumpulkan kerang, dan menggunakan pipa panjang untuk oksigen.

Chin

Chin adalah kelompok etnis besar yang terdiri dari banyak subkelompok yang berbeda, yang berbicara antara 40 hingga 45 dialek yang berbeda. Mereka tinggal di Negara Bagian Chin, pegunungan terpencil dan hutan lebat di barat laut Myanmar, dekat perbatasan India dan Bangladesh. Nama Chin diperkirakan berasal dari Lembah Chindwin, tempat mereka pertama kali memasuki Myanmar pada abad ke-9 Masehi. Pakaian tradisional mereka biasanya sangat berwarna-warni – terutama merah, hijau, dan hitam, berbeda dari satu suku ke suku lainnya. Pada hari-hari festival seperti Hari Nasional Chin (yang menandai hari ketika mereka secara resmi memperoleh hak asasi manusia), mereka tampil dengan pakaian tradisional mereka secara lengkap. Sarung berwarna cerah, sering kali bermotif, yang dikenakan dengan ikat pinggang emas atau perak, bersama dengan sebanyak mungkin perhiasan yang dapat mereka kenakan! Cincin, jepit rambut, kalung, dan gelang, semuanya memainkan peranan besar dalam pakaian resmi, dan pakaian sering dihiasi dengan lonceng, jumbai, dan kerang. Orang Chin pada awalnya menganut animisme dalam hal agama, tetapi selama abad ke-19, sebagian besar dari mereka berpindah agama menjadi Kristen oleh para misionaris Kristen. Mereka secara historis dikenal karena tato wajah mereka yang luar biasa – terutama diberikan kepada perempuan sebagai tanda kecantikan. Meskipun orang Chin sangat bangga dengan hal tersebut, praktik tato wajah saat ini telah dilarang oleh otoritas Burma dan hanya segelintir perempuan Chin yang masih memiliki tato wajah kuno ini hingga sekarang. Chin merupakan salah satu kelompok minoritas Myanmar yang paling teraniaya. Selama masa junta militer, mereka dianiaya oleh tentara Burma, dan puluhan ribu orang Chin melarikan diri ke India untuk menghindari kekerasan, yang kemudian menciptakan ketegangan politik antara kedua negara. Mereka juga merupakan kelompok etnis termiskin di Myanmar dengan sekitar 40 persen hidup tanpa makanan yang cukup, dan 70 persen hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebagian besar kekurangan pangan ini disebabkan oleh serangkaian peristiwa alam yang tidak menguntungkan yang terjadi pada tahun 2006 ketika hutan bambu di wilayah tersebut berbunga (yang hanya terjadi kira-kira setiap 50 tahun!). Hewan pengerat tertarik dan berkembang biak, karena tertarik oleh buah dari pepohonan, yang kemudian memakan persediaan biji-bijian lokal, sehingga menyebabkan kelaparan di kalangan penduduk Chin.

Kachin / Jingpo

Orang Kachin merupakan yang terkecil dari “major national ethnic races”, mendiami perbukitan Kachin di bagian utara Negara Bagian Kachin, serta mencakup wilayah Provinsi Yunnan di Tiongkok dan sebagian wilayah India Timur Laut. Orang-orang sering menggunakan nama Kachin secara bergantian dengan nama sub-kelompok utama – Jingpo (atau Jinghpaw). Pakaian tradisional Kachin umumnya berwarna hitam, dengan hiasan perak baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perempuan terkadang mengenakan rok wol berwarna-warni, dan laki-laki mengenakan sorban – putih untuk kaum muda, hitam untuk kaum lanjut usia. Orang Jingpo terkenal sangat terampil dalam kemampuan bertahan hidup dan bertempur, serta dalam kerajinan tangan dan pengobatan herbal. Negara Bagian Kachin dikenal karena sumber daya alamnya yang melimpah seperti batu giok. Perisai besar yang terbuat dari kulit kerbau, bersama dengan helm berlapis pernis hitam yang dihiasi taring babi hutan, memberikan penampilan yang sangat mengesankan. Seperti halnya Chin, orang Kachin telah dikristenkan dan saat ini antara setengah hingga dua pertiga dari populasinya beragama Kristen (selebihnya sebagian besar beragama Buddha dan menganut animisme). Orang Kachin telah mengalami banyak konflik bersenjata selama beberapa dekade terakhir, ketika mereka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari Myanmar, hingga menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Burma pada tahun 1994. Namun, hal ini hanya berlangsung hingga tahun 2011, dan ketidak-stabilan politik serta kekerasan fisik masih marak terjadi di Negara Bagian Kachin. Saat ini, wilayah tersebut tidak direkomendasikan sebagai tujuan bagi para pelancong.

Kayin / Karen

Negara Bagian Kayin terletak di bagian selatan dan tenggara Myanmar, tempat orang-orang Kayin atau Karen tinggal. Kelompok etnis ini terdiri dari sejumlah besar sub-kelompok yang berbeda, banyak di antaranya tidak saling berhubungan dan hanya memiliki sedikit kesamaan selain lokasi geografis. Sulit untuk memperkirakan berapa jumlah orang Kayin/Karen, karena mereka tersebar di seluruh Negara Bagian Kayin dan wilayah sekitarnya, tetapi diperkirakan mereka berjumlah sekitar 7 persen dari populasi Myanmar. Sebagian besar suku dapat ditemukan di pegunungan, di desa-desa antara Myanmar dan Thailand. Bagian besar dari kehidupan sehari-hari orang Kayin/Karen adalah musik – khususnya perempuan, dapat terlihat di desa-desa memainkan gitar.

Seperti beberapa kelompok etnis utama lainnya, orang Kayin/Karen sebagian besar telah berperang dengan pemerintah Myanmar selama lebih dari 60 tahun, untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Mereka terdiri dari umat Buddha, penganut animisme, dan umat Kristen, dan banyak dari kelompok yang terakhir mengalami penganiayaan dan melarikan diri ke negara tetangga Thailand.

Kayah / Karenni

Yang memiliki hubungan dekat dengan Kayin adalah kelompok Kayah dari kelompok kebangsaan etnis, yang juga dikenal sebagai Karenni atau Karen Merah. Orang Kayah mendiami Negara Bagian Kayah – wilayah yang cukup kecil yang terletak tepat di sebelah timur Myanmar, dan Negara Bagian Shan yang berdekatan, serta beberapa bagian Thailand. Gambaran paling terkenal tentang Kayah adalah perempuan ‘berleher panjang’ yang mengenakan cincin kuningan di leher mereka untuk memberikan ilusi memiliki leher yang panjang dan ramping. Kelompok kecil yang melakukan hal ini dikenal sebagai Kayan Lahwi atau Padaung. Mereka mulai mengenakan lilitan ini pada usia lima tahun dan menambahkan lebih banyak cincin seiring bertambahnya usia. Kenyataannya, lilitan tersebut tidak meregangkan leher itu sendiri tetapi menekan tulang selangka dan tulang rusuk. Menurut mitos, hal ini pertama kali dilakukan untuk melindungi leher dari gigitan harimau! Setelah rezim militer di Myanmar melarang praktik tradisi suku tertentu seperti cincin leher dan tato wajah, banyak orang Padaung melarikan diri ke Thailand. Namun, saat ini tidak semua perempuan dari desa-desa ini masih mengenakan cincin, karena mereka telah menjadi semacam tontonan bagi para wisatawan. Meskipun saat ini, mereka sebagian besar merupakan kelompok etnis Kristen, bagian dari tradisi Kayan adalah agama mereka sendiri yang disebut Kan Khwan yang konon berasal dari Zaman Perunggu. Tradisi menyatakan bahwa keputusan bersama masyarakat Kayan dilakukan melalui ramalan – seperti membaca tulang ayam atau mematahkan rumput ilalang. Mereka percaya bahwa penciptaan dunia terjadi ketika dewa menancapkan sebuah tiang ke tanah.

Shan

Shan (juga dikenal sebagai Tai Yai) adalah kelompok etnis terbesar setelah Bamar, yang mencakup lebih dari 9 persen populasi Myanmar. Kelompok ini mencakup banyak minoritas etnis yang berbeda (sekitar 33 etnis secara keseluruhan), yang sebagian besar tinggal di bagian timur dan timur laut Myanmar. Orang Shan pada dasarnya adalah petani padi sawah, tetapi pada suatu waktu Negara Bagian Shan bertanggung jawab atas setengah dari produksi opium dunia. Mereka sebagian besar mempraktikkan Buddhisme Theravada, bersama dengan agama rakyat Tai. Mereka dahulu memiliki sistem feodal yang kompleks di mana mereka diperintah oleh para pangeran turun-temurun. Baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah mengenakan sorban, dan warna merupakan bagian penting dari proses tumbuh dewasa dalam masyarakat Shan.

Anak perempuan mulai mengenakan pakaian berwarna cerah pada usia 14 tahun, dan ketika mereka semakin dewasa, pakaian tersebut secara bertahap menjadi semakin tidak berwarna. Laki-laki, di sisi lain, tetap mengenakan celana longgar berwarna biru tua. Ketika perempuan mencapai usia 40 tahun, mereka mulai mengenakan pakaian hitam yang kemudian mereka kenakan selama sisa hidup mereka. Bahkan, perempuan yang lebih tua dalam masyarakat Shan cenderung kehilangan identitas mereka sendiri ketika mereka semakin tua – sebaliknya, mereka disebut sebagai istri seseorang, bukan sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Tempat tinggal mereka biasanya berupa rumah bambu tinggi yang dibangun di atas tiang. Hal ini karena wilayah yang mereka huni merupakan hutan hujan tropis, dan cara ini membuat mereka terhindar dari tanah yang lembap. Di bawah rumah terdapat hewan ternak seperti babi dan ayam, dan ada dua ember air di bagian bawah tangga untuk mencuci kaki sebelum masuk ke rumah – satu untuk tamu yang diundang, dan satu untuk pengunjung yang tidak diharapkan. Balkon merupakan tempat untuk tarian tradisional Shan, dan biasanya terdapat sebuah tempat pemujaan di ruang keluarga. Salah satu subkelompok Shan adalah H'Mong, yang terkenal dengan tradisi tekstil mereka berupa tenunan yang indah serta pakaian yang cerah dan berwarna-warni.

Rakhine

Orang Rakhine adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Myanmar, yang mencakup sekitar 4 hingga 5 persen dari populasi. Mereka memiliki hubungan dekat dengan orang Bamar tetapi telah mengadopsi lebih banyak pengaruh budaya India karena pegunungan Myanmar mengisolasi mereka dari bagian lain negara tersebut. Mereka sebagian besar tinggal di Negara Bagian Rakhine yang berada di pantai barat Myanmar. Mereka juga dikenal sebagai orang Arakan dan merupakan ras yang benar-benar kuno yang telah tinggal di bagian Myanmar sejak 3.325 SM, dan mendirikan Kerajaan Rakhine pertama. Negara Bagian Rakhine juga merupakan rumah bagi Muslim Rohingya, yang telah lama menghadapi penganiayaan dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai warga negara. Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari anak benua India, sehingga membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tanpa hak perlindungan. Kekerasan sering terjadi di sini, terutama antara Rakhine dan Rohingya, dan Negara Bagian Rakhine tetap menjadi salah satu bagian Myanmar yang paling miskin dan paling tidak stabil.

Mon

Kelompok etnis utama lainnya di Myanmar adalah Mon, yang hanya terdiri dari satu kelompok, berbeda dengan berbagai kelompok yang membentuk tujuh ras lainnya. Sekitar 2 persen dari populasi adalah Mon, dan sebagian besar dari mereka tinggal di Negara Bagian Mon dan bagian lain dari perbatasan selatan, dan terdapat banyak orang Mon di Thailand juga.

Mon adalah salah satu masyarakat pertama yang menetap di Asia Tenggara, dan karena alasan ini, mereka dianggap telah memberikan pengaruh terhadap sebagian besar budaya Burma saat ini. Dipercaya juga bahwa orang Mon-lah yang membawa Buddhisme Theravada ke wilayah tersebut, dan hingga saat ini mereka sebagian besar masih mengikuti agama ini. Simbol budaya Mon adalah burung air mitologis (yang bentuknya agak menyerupai angsa) yang disebut hongsa, yang umumnya dikenal sebagai hinthta. Mereka memiliki festival-festival yang luar biasa dan warisan musik yang indah, termasuk alat-alat musik tradisional seperti gong, harpa saung, dan xilofon buaya! Alat-alat musik ini mengiringi tarian tradisional mereka yang dipentaskan di desa-desa.

Masalah Yang Dihadapi Delapan Etnis Utama di Myanmar Saat ini

Tidak seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya, masalah utama yang dihadapi oleh kelompok-kelompok etnis minoritas Myanmar bukan berasal dari luar perbatasannya, melainkan dari dalam negeri. Myanmar sendiri baru saja terbuka untuk pariwisata dengan dibebaskannya Aung San Suu Kyi, dan negara tersebut masih muncul dari penindasan militer dan politik, yang sebagian besar masih berlangsung. Kelompok-kelompok minoritas khawatir menjadi sebuah budaya yang seragam dan berjuang (dan di banyak tempat, secara fisik bertempur) untuk melindungi warisan dan tanah mereka. Selama lebih dari 60 tahun terakhir, banyak kelompok etnis minoritas telah berusaha memperoleh kemerdekaan dari Myanmar, dan perjuangan ini masih berlangsung di banyak tempat. Selain delapan kategori etnis utama yang telah diuraikan, terdapat sejumlah kecil suku tidak resmi yang tidak diakui oleh pemerintah Burma, termasuk orang India Burma, Rohingya, Anglo-Burma, Lisu, Raway, Tionghoa Burma dan masih banyak lagi. Secara bersama-sama, kelompok-kelompok tanpa kewarganegaraan ini membentuk sekitar 10% dari orang-orang yang tinggal di Myanmar.

Konflik Yang Telah Berlangsung Lebih dari 60 Tahun

Konflik di Myanmar telah berlangsung selama lebih dari enam puluh tahun, menjadikannya salah satu konflik yang paling lama berlangsung di dunia. Hingga saat ini, baik komunitas internasional yang terdiri atas aktor-aktor seperti negara, organisasi internasional, NGO (Non Government Organization) maupun aktor-aktor internal belum mampu memberikan jalan keluar yang sesuai, menuju perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan. Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik sejauh ini telah gagal karena upaya penyelesaian konflik sebagian besar berfokus pada upaya mengendalikan konflik dengan tujuan untuk menghilangkannya. Pendekatan semacam itu tidak sesuai untuk konflik asimetris ketika negara merupakan pihak yang menjadi masalah. Upaya-upaya menuju perdamaian di Myanmar telah terbatas karena isu-isu yang menjadi asal mula perjuangan tersebut telah diabaikan, karena dianggap tidak dapat diselesaikan dan dengan demikian mustahil untuk ditangani.

Upaya penyelesaian konflik yang berfokus pada isu “*Conflict Resolution*” terlalu menyederhanakan kompleksitas konflik etnis dan dengan demikian gagal memberikan solusi nyata terhadap konflik yang berkepanjangan.

Latar Belakang Konflik

Myanmar telah menarik banyak perhatian karena reformasi demokratis radikal yang telah dilakukan oleh pemerintahan yang baru terpilih dalam rangka mengubah negara tersebut. Presiden Thein Sein telah melakukan serangkaian reformasi politik yang “*berpusat pada rakyat*” dengan berfokus pada 10 bidang prioritas yang akan mengubah Myanmar menjadi negara yang “*normal*”, mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warga Myanmar. Sejak demokratisasi dimulai, beberapa gencatan senjata telah dilanggar dan bentrokan etnis, yang merupakan bagian tragis dari sejarah Myanmar, terus berlanjut. Myanmar memang dicirikan oleh keragaman etnis yang besar yang selalu menimbulkan persoalan dalam pemerintahan. Negara ini terdiri atas mayoritas Burman, tujuh kelompok etnis utama dan puluhan kelompok yang lebih kecil. Mereka tersebar di seluruh struktur kolonial yang masih bertahan, yang terdiri atas tujuh negara bagian di wilayah periferal yang dihuni oleh kelompok-kelompok etnis minoritas dan tujuh divisi yang diperuntukkan bagi mayoritas Burman dan kelompok-kelompok etnis minoritas mencakup 41% dari populasi yang sebagian besar beragama Buddha. Ketika Burma memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, bekas koloni Inggris tersebut memiliki semua perangkat untuk mempertahankan sistem demokrasi yang telah diterapkan oleh Inggris. Memang, sistem parlementer bertahan hingga kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada 2 Maret 1962. Sejak saat itu, isolasionisme dan sosialisme menjadi garis kebijakan utama rezim militer baru Myanmar. Negara secara bertahap menutup diri dari dunia ketika Junta militer menjadi semakin kuat. Warga Myanmar kehilangan hak mereka untuk memilih, kebebasan berekspresi dan banyak kebebasan sipil dasar lainnya. Di tengah kondisi penindasan tersebut, banyak kelompok pemberontak lahir, berjuang untuk memperoleh hak-hak dasar mereka, terutama untuk mempertahankan kelangsungan hidup kelompok etnis mereka.

Pada tahun 1947, dalam persiapan menuju kemerdekaan, Perjanjian Panglong, yang dipandang sebagai perjanjian pendirian Uni Burma atau Myanmar pada masa kini, ditandatangani antara para penguasa pasca-kolonial dan kelompok-kelompok minoritas untuk menjamin pengakuan terhadap rakyat mereka, otonomi mereka dan hak mereka untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Meskipun komunitas-komunitas etnis memiliki arti penting di Myanmar, perjanjian yang inklusif tersebut dengan cepat dilupakan setelah Aung San, salah satu penggagasnya, dibunuh dan militer mengambil alih negara. Proses Perjanjian Panglong semakin terancam oleh keputusan untuk menjadikan agama Buddha sebagai agama negara Myanmar pada tahun 1961 karena keberadaan minoritas kecil Muslim di Myanmar, yang berasal dari India dan merasa terancam oleh upaya asimilasi ini.

Komunitas Muslim bukanlah satu-satunya kelompok minoritas yang merasa terancam oleh rezim Myanmar. Ketika cengkeraman militer atas negara semakin kuat, berkembang sentimen nasionalistik yang kuat karena kelompok-kelompok minoritas merasa bahwa mereka secara paksa diasimilasikan ke dalam komunitas yang lebih besar dan kehilangan budaya, agama dan bahasa mereka. Selama beberapa dekade berikutnya, Myanmar menjadi tempat berlangsungnya konflik bersenjata yang penuh kekerasan antara partai yang berkuasa dan faksi-faksi etnis. Pada tahun 1989, partai yang berkuasa, State Law and Order Restoration Council (SLORC), mencapai tingkat tertinggi dari kebijakan asimilasinya dengan mengubah nama negara dari Burma, yang merujuk pada *“negara-bangsa plural pascakolonial yang multietnis, multiagama dan multibudaya”*, menjadi Myanmar, sehingga menghilangkan setiap rujukan terhadap kemajemukan etnis bangsa tersebut.

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, protes rakyat yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembelaan hak-hak minoritas ditindas secara keras oleh pemerintah. Pada periode yang sama, sejumlah gencatan senjata ditandatangani antara rezim militer Myanmar dan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, namun tidak ada pelucutan senjata maupun kemajuan yang dicapai dalam persoalan-persoalan etnis. Penolakan rezim militer untuk mundur bahkan setelah kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilu tahun 1990 menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di seluruh negeri. Namun, pada tahun 1992, SLORC mengumumkan niatnya untuk melakukan reformasi terhadap negara melalui sebuah konvensi nasional. Setelah 14 tahun deliberasi, disepakati bahwa Referendum Nasional akan diselenggarakan untuk memberikan suara terhadap konstitusi baru, yang kemudian disahkan pada tahun 2008 setelah jumlah pemilih yang sangat besar dalam referendum tersebut. Hal ini kemudian mengarah pada pemilihan pemerintahan kuasi-sipil baru yang mulai berkuasa pada Maret 2011. Meskipun hal ini merupakan kemenangan bagi NLD, Konstitusi 2008 masih memberikan kewenangan yang besar kepada militer, yang memiliki kendali atas kekuasaan eksekutif negara.

Sejak dilantik, pemerintahan baru telah melakukan apa yang tampak sebagai perubahan radikal dalam pemerintahan Myanmar. Pada 19 Januari 2013, Presiden Thein Sein mengungkapkan gelombang reformasi keduanya kepada negara-negara dan organisasi donor. Dalam pernyataannya, ia mengumumkan niatnya untuk *“mengubah negara menjadi demokrasi modern dan maju”*. Namun, terlepas dari antusiasme yang telah mengguncang komunitas internasional, berbagai pertanyaan telah muncul mengenai keterbukaan Myanmar. Memang, inti dari konsep demokrasi adalah kemampuan untuk menangani keragaman internal melalui cara-cara damai, namun kekerasan sipil dan perselisihan etnis yang kembali terjadi telah mengingatkan dunia bahwa demokrasi atau berakhirnya otoritarianisme bukanlah kondisi yang cukup untuk menciptakan perdamaian.

Rangkuman Perspektif Seluruh Pembahasan

Transformasi politik dan ekonomi masyarakat pedesaan Myanmar dimulai pada pertengahan abad kesembilan belas jauh sebelum Inggris tiba, namun memiliki sisi negative, karena dampak buruk pemerintahan asing serta keputusan untuk lebih mengandalkan orang India dan kelompok etnis minoritas dalam administrasi dan pertahanan koloni daripada orang-orang Burman. Perasaan terasing dan kehilangan hak di negeri mereka sendiri, menyebabkan munculnya asosiasi-asosiasi desa pada tahun 1920-an dan penanganan yang buruk terhadap situasi pedesaan yang melahirkan pemberontakan Hsaya San, juga merupakan pilihan-pilihan buruk yang menjadi kesalahan administrasi kolonial. Di sisi lain, pemerintahan Inggris juga membawa peluang ekonomi baru ke Burma/Myanmar pedesaan, infrastruktur transportasi yang lebih baik, dan beberapa manfaat pengobatan Barat.

Dalam sejarah modernnya, Myanmar telah dibentuk dan dibentuk kembali berulang kali oleh pemerintahan-pemerintahan yang berbeda dalam konteks tekanan-tekanan besar yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terlepas dari pengalaman sejarahnya yang beragam dan penuh tantangan, orang sering dikejutkan oleh betapa sedikitnya Myanmar tampaknya telah berubah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di kawasan yang lebih dinamis secara politik dan lebih makmur secara ekonomi. Orang-orang Myanmar dewasa ini sama tidak bahagiannya dengan pemerintah mereka seperti generasi-generasi sebelumnya, kemiskinan ekonomi terus menjadi perhatian utama masyarakat Myanmar sebagaimana halnya pada masa-masa sebelumnya. Kebebasan-kebebasan sipil dasar ditolak dewasa ini sebagaimana halnya hampir setengah abad yang lalu.

Kesinambungan telah menjadi ciri dari beberapa tema dasar sejarah modern Myanmar yang melampaui berbagai fase pengalaman Myanmar. Di antara persoalan-persoalan paling pelik yang telah melanda negara ini sejak masa kolonial adalah hubungan antara dataran rendah yang didominasi oleh Burman dan dataran tinggi yang didominasi oleh kelompok-kelompok etnis minoritas. Sebelum pemerintahan kolonial, takhta Myanmar menganggap dataran tinggi sebagai bagian dari kerajaan, tetapi bukan bagian dari "*negeri*" Burman. Di bawah dinasti Myanmar terakhir, negara-negara di dataran tinggi diperintah oleh para kepala daerah yang otonom dan memberikan upeti, yang terpisah dari pusat-pusat dataran rendah yang berada di bawah kendali para pejabat yang ditunjuk langsung oleh istana Myanmar. Kecemasan politik, dan bukan persoalan etnis, mendominasi konflik, meskipun perbedaan budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya di antara berbagai masyarakat yang membentuk kerajaan memang diakui. Tema lain yang terus-menerus muncul dalam sejarah modern Myanmar adalah kemiskinan masyarakat Myanmar secara umum.

Meskipun pembangunan ekonomi kolonial sedikit memperbaiki keadaan ekonomi banyak orang Myanmar, kemakmuran ekonomi yang sesungguhnya hanya dinikmati oleh sangat sedikit orang, terutama di kalangan elite kolonial. Bahkan pada saat itu, keterhubungan ekonomi Burma dengan sistem kapitalis dunia dan kegagalan untuk cukup mendiversifikasi ekonomi membuatnya rentan terhadap gejolak pasar-pasar Barat dan Depresi Dunia. Pukulan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Burma datang dengan pecahnya Perang Dunia II, berupa penghancuran infrastruktur ekonomi dan transportasi Myanmar oleh Inggris pada tahun 1942, terputusnya Myanmar dari pasar dunia setelah itu, serta pertempuran antara Sekutu dan Jepang, terutama pada bulan-bulan terakhir perang. Upaya-upaya Inggris untuk membangun kembali ekonomi kolonial setelah perang demi kepentingan kolonial hanya memberikan sedikit bantuan bagi sebagian besar masyarakat Myanmar. Myanmar setelah kemerdekaan harus menghadapi kehancuran dan biaya perang saudara yang berlangsung lebih lama daripada konflik mana pun di tempat lain di dunia.

Tema jangka panjang lainnya dari sejarah modern Myanmar adalah perjuangan antara para politisi sipil yang menghendaki pemerintahan yang representatif, demokratis dan kebebasan sipil dengan kendali otoriter, baik di bawah kaum kolonialis Inggris maupun para perwira militer pribumi. Meskipun kaum nasionalis Myanmar pada masa kolonial memenangkan perjuangan mereka melawan Inggris, absennya Inggris setelah kemerdekaan menghilangkan dari panggung politik seorang lawan yang tunggal dan terlihat jelas yang dapat membantu mempertahankan solidaritas politik. AFPFL (Anti-Fascist People's Freedom League/Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis) merupakan kelompok payung dari partai-partai politik yang dipersatukan baik oleh penentangan bersama mereka terhadap pemerintahan kolonial maupun oleh karisma pribadi dan keterampilan politik Aung San. Ketika Aung San dibunuh pada tahun 1947, Nu mengambil alih kepemimpinan. Meskipun Nu patut dikagumi karena berbagai alasan dan komitmennya terhadap negara tidak diragukan, perilakunya terlalu eksentrik dan sering kali terlalu tidak menentu untuk mempertahankan koalisi politik tersebut. Dorongan menuju kemerdekaan untuk sementara telah mengesampingkan banyak persoalan politik yang sekarang harus diselesaikan dengan terlalu banyak dan terlalu beragam kekuatan politik yang berada di lapangan. Salah satu alat yang digunakan oleh rezim-rezim pasca-1962 dalam upaya untuk melegitimasi kendali mereka diwarisi dari masa kolonial. Inggris telah berhasil memperpanjang pemerintahan kolonial di Burma/Myanmar sebagian dengan mengizinkan konsesi-konsesi konstitusional kecil sambil tetap mempertahankan kendali atas pusat-pusat kekuasaan yang sebenarnya dalam pemerintahan kolonial. Hal ini menempatkan orang-orang Myanmar pada posisi-posisi yang terlihat dalam pemerintahan, biasanya dalam bidang-bidang pemerintahan yang sebenarnya tidak terlalu diminati oleh Inggris, tetapi tidak mengurangi kewenangan kolonial secara keseluruhan.

Ne Win sangat mahir menggunakan taktik-taktik serupa sehingga orang mungkin memandang periode Revolutionary Council dan penerusnya, BSPP (Burma Socialist Programme Party), sebagai periode yang kaya secara ideologis dibandingkan dengan SLORC/SPDC (State Law and Order Restoration Council/State Peace and Development Council). Terlepas dari reformasi berorientasi Marxis yang dilakukan Tin Pe, basa-basi mengenai partisipasi massa dalam pemerintahan, dan struktur negara sipil satu partai, Ne Win dan militer tetap memegang kendali penuh atas negara. Mereka yang paling berkomitmen pada prinsip-prinsip ideologi "*Burmese Way to Socialism*" disingkirkan dari pemerintahan BSPP, sementara posisi-posisi kepemimpinan senior ditentukan berdasarkan loyalitas pribadi kepada Ne Win.

Rezim-rezim Myanmar pasca-1962 mempertahankan netralitas internasional resmi yang dipromosikan di bawah Nu dan meskipun pemerintahan Revolutionary Council dan BSPP berhubungan erat dengan Uni Soviet dan memang menjauh dari RRT, tidak ada keberpihakan resmi yang dipertimbangkan. Apakah hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah menggunakan Perang Dingin demi keuntungannya, dengan memperoleh bantuan dari kedua pihak, atau untuk mempertahankan prinsip mengisolasi Myanmar dari intervensi eksternal, tidaklah jelas. Dalam kedua kasus tersebut, SLORC membawa ketakutan terhadap intervensi eksternal ke tingkat yang baru, dengan cara yang sangat terbuka, pada tahun 1988.

Hubungan pribadi Aung San Suu Kyi yang dekat dengan Barat dan dukungan yang diterimanya di dalamnya telah membantu membuat seruan di kalangan penguasa militer Myanmar untuk menolak campur tangan Barat menjadi semakin kuat. Hal ini juga sebagian disebabkan oleh keberadaan Aung San Suu Kyi yang terus berlanjut dan fakta bahwa penolakan terhadap pengakuan hasil pemilu 1990 terus terutama didasarkan pada intervensi asing. Sanksi-sanksi internasional memperkuat tekad pemerintah untuk membentuk kembali ancaman eksternal dengan memasukkan Barat secara umum.

Tema utama lainnya dalam sejarah Burma adalah partisipasi monastik dalam politik. Menurut aturan monastik, para biksu tidak seharusnya melibatkan diri dalam politik duniawi, tetapi secara historis keterlibatan ini sangat nyata, baik sebelum maupun sesudah kolonialisme. Para biksu seperti Ottama dan para biksu politik di pedesaan Myanmar, memainkan peran utama dalam gerakan antikolonialisme Myanmar. Organisasi-organisasi monastik memainkan peran mendasar dalam mendorong pengakuan negara terhadap agama Buddha sebagai agama nasional dan memobilisasi perlawanan terhadap pemberontakan Komunis. Masalah mendasar yang dihadapi SPDC dalam hubungannya dengan para biksu adalah bahwa dalam masyarakat Myanmar mereka secara potensial sangat berkuasa.

Dalam sistem kepercayaan Buddhis Myanmar, sumbangan kepada para biksu merupakan cara penting untuk memperoleh kebajikan guna mengalami kelahiran kembali yang lebih baik dalam perjalanan menuju Pencerahan dan apabila sumbangan tersebut ditolak, maka seseorang menghadapi kemungkinan kelahiran kembali yang lebih rendah. Pada tingkat lain, para biksu Myanmar sejak masa prakolonial telah menjadi penjaga tradisi Burma dan inti kehidupan intelektual Myanmar. Ketika anak laki-laki Buddhis Myanmar, bahkan mereka yang kemudian tumbuh menjadi tentara, menjadi calon biksu, mereka dididik di biara-biara dan belajar untuk mengakui kewenangan para biksu yang tidak dapat dipertanyakan dalam menentukan apa yang merupakan dan apa yang bukan perilaku Buddhis Myanmar yang pantas. Hal ini dengan mudah diperluas ke bidang politik dan jika para biksu tidak menyetujui klaim rezim untuk mewakili "*Myanmar yang sebenarnya*", hal tersebut memiliki arti yang lebih besar daripada suara penentangan lainnya. Ketika para biksu menolak sumbangan dari keluarga-keluarga elite militer dan mengeluhkan arah yang ditempuh negara, pemerintah kehilangan keuntungan apa pun, jika memang ada, yang telah diperolehnya dalam upaya membangun legitimasi politik domestik. Hal ini dipastikan ketika tentara dan polisi menangkap, menanggalkan jubah, dan memukuli para biksu dalam upaya putus asa untuk menekan apa yang mungkin terbukti sebagai pukulan mematikan bagi rezim. Tentu saja, semua indikasi, pada saat tulisan ini dibuat, menunjukkan bahwa oposisi monastik belum berhasil ditundukkan. Para biksu akan terus memainkan peran penting dalam membentuk masa depan politik negara tersebut, terutama karena peran monastik dalam demonstrasi dengan jelas menunjukkan bahwa legitimasi berada di pihak oposisi.

Temuan berbagai kajian menunjukkan bahwa, transformasi konflik ("*Conflict Transformation*") dapat membawa Myanmar bergerak maju menuju demokrasi, pembangunan dan perdamaian. Hal tersebut memerlukan implementasi yang hati-hati dan pemantauan yang sistematis, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam konflik dan, jika memungkinkan, bantuan dari pihak eksternal. "*Conflict Transformation*", termasuk rekonsiliasi, perubahan tata kelola, transformasi sikap dan perilaku serta pembangunan kepercayaan, merupakan suatu proses yang berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sehingga seseorang tidak seharusnya mengharapkan hasil yang segera. Penerapan "*Conflict Transformation*" membutuhkan komitmen yang mendalam dan berjangka panjang dari berbagai pihak yang mungkin tidak mampu menyediakan sumber daya, dana, waktu, mekanisme pemantauan, ruang negosiasi dan dukungan yang memadai yang diperlukan untuk penyelesaian konflik secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, dengan mempertimbangkan jumlah aktor yang terlibat dalam transformasi tersebut, komunikasi, fleksibilitas dan saling pengertian merupakan hal yang sangat penting. Hal ini membutuhkan adaptasi budaya.

Epilog: Ke Mana Myanmar Akan Bergerak?

Masa depan Myanmar masih berada di persimpangan. Militer mungkin masih mampu mempertahankan kekuasaan politik dalam waktu dekat, tetapi sulit bagi junta untuk mengembalikan Myanmar sepenuhnya ke keadaan sebelum 2021. Perlawanan dari kelompok pro-demokrasi dan organisasi etnis bersenjata telah mengubah struktur politik dan sosial negara tersebut secara mendalam. Karena itu, masa depan Myanmar kemungkinan tidak ditentukan semata-mata oleh kemenangan militer, tetapi oleh kemampuan berbagai kekuatan—militer, kelompok demokrasi, dan kelompok etnis—untuk menemukan “*kesepakatan politik baru*”. Demokrasi saja mungkin tidak cukup; Myanmar membutuhkan demokrasi yang sekaligus memberikan ruang bagi federalisme, otonomi daerah, dan pengakuan terhadap keberagaman etnisnya. Dengan demikian, Myanmar mungkin masih akan melalui masa konflik yang panjang. Namun, di balik konflik tersebut terdapat peluang untuk membangun sebuah Myanmar yang berbeda: “*negara federal yang demokratis, lebih inklusif, dan menempatkan militer di bawah kendali pemerintahan sipil*”. Apabila proses itu berhasil, sejarah Myanmar setelah 2021 tidak hanya akan dikenang sebagai periode perang dan krisis, tetapi sebagai titik awal lahirnya “*kontrak politik baru bagi bangsa Myanmar*”.

Kesimpulan

Sejarah Myanmar sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1948 menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan di negara ini bukan semata-mata persoalan antara pemerintah dan kelompok pemberontak, atau antara militer dan gerakan demokrasi. Akar persoalannya jauh lebih dalam, yaitu kegagalan membangun kesepakatan politik yang mampu mengakomodasi keragaman etnis, kepentingan daerah, dan tuntutan akan otonomi serta federalisme. Kesepakatan Panglong 1947 sebenarnya telah memberikan dasar bagi terbentuknya sebuah Union yang lebih inklusif, tetapi prinsip-prinsip tersebut tidak pernah sepenuhnya diwujudkan. Keadaan tersebut diperburuk oleh lemahnya institusi negara setelah kemerdekaan, munculnya pemberontakan komunis dan etnis, serta semakin kuatnya peran militer dalam politik. Kudeta Jenderal Ne Win pada 1962 mengakhiri eksperimen demokrasi parlementer dan membawa Myanmar ke dalam pemerintahan militer yang panjang. Sejak saat itu, persoalan persatuan negara, identitas etnis, federalisme, dan demokrasi semakin bercampur dengan persoalan kekuasaan militer. Karena itu, hampir delapan dekade konflik Myanmar dapat dipahami sebagai krisis pembentukan negara (“*state-building*”) yang belum terselesaikan. Pergantian rezim, pemilu, gencatan senjata, maupun perubahan konstitusi belum mampu menyelesaikan persoalan dasarnya. Bahkan periode transisi demokrasi 2011–2020 akhirnya berakhir dengan kudeta militer pada 2021 dan kembali membuka konflik berskala nasional.

Masa depan Myanmar tidak cukup hanya dikembalikan kepada demokrasi, tetapi membutuhkan sebuah kesepakatan politik baru yang mampu mempertemukan demokrasi, federalisme, otonomi daerah, hak-hak kelompok etnis, dan supremasi pemerintahan sipil atas militer. Selama persoalan tersebut belum diselesaikan, pergantian pemerintahan hanya akan menjadi perubahan di permukaan, sementara akar konflik tetap hidup. Pada akhirnya, persoalan Myanmar bukan sekadar siapa yang memerintah Myanmar, tetapi bagaimana membangun sebuah negara yang dapat diterima oleh seluruh bangsa-bangsa yang hidup di dalamnya. Inilah tantangan terbesar Myanmar setelah hampir delapan puluh tahun merdeka.

Jakarta, 24 Agustus 2026

Referensi:

1. Durand, Lauren., Conflict in Myanmar: A Systemic Approach to Conflict Analysis and Transformation, Lauren Durand, Lund University, Sweden (no date and year of publication)
2. Gravers, Mikael., Exploring Ethnic Diversity in Burma, Nordic Institute of Asian Studies, 2007
3. Charney, Michael W., A History of Modern Burma, Michael W. Charney, University of London, Cambridge University Press, 2009
4. Ethnic Group of Myanmar: An Ethnological Guide to Burmese Tribes, Rainforest Cruises, May 14, 2020
5. Deciphering Myanmar's Ethnic Landscape: A Brief Historical and Ethnic Description of Myanmar's Administrative Units, IDEA, 2022
6. Myanmar National Portal: A Brief History of Myanmar, August 23, 2026
7. Maps of Myanmar copied from WolrdAtlas, 2026

